

SEBAB-SEBAB ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN SULIT UNTUK DITURUNKAN

Dwi Suhartini¹, Ujang Syaiful Hidayat², Sofie Yunida Putri³

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email : suhartinidwi7@gmail.com

²Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur
Email : udjangsyaiful@gmail.com

³Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur
Email : sofieyunidaputri@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan besar yang dihadapi hampir diseluruh Negara di dunia, terutama bagi Negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Jawa Timur tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut badan pusat statistik provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 tercatat sebesar 11,77% dari penduduk Jawa Timur berada dalam jurang kemiskinan dan Kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke sepuluh dalam peringkat kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2017 mencapai 171.38 ribu jiwa. Namun, menurut informasi yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan Dinas Sosial setempat menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2019 telah mengalami penurunan menjadi 148.917 ribu jiwa. Penelitian ini menggali sebab-sebab kemiskinan, sejauhmana tingkat efektifitas dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan menggunakan field study (studi lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk studi lapangan, peneliti secara individu akan berkomunikasi dan mengamati secara langsung di lapangan pada masyarakat sebagai penerima program-program pengentasan kemiskinan pada wilayah yang menjadi target sampel, yaitu Kecamatan Sarirejo, Babat dan Brondong. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Lamongan, seperti adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran, belum meratanya sarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan belum memadai, pemberdayaan masyarakat pada usaha mikro belum optimal. Namun, saat ini semua perangkat daerah sudah melakukan usaha perbaikan secara terus menerus, seperti penambahan fasilitas kesehatan pada setiap desa berupa Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan mobil sehat, serta melakukan verifikasi dan validasi ulang atas jumlah masyarakat miskin. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan belum efektif dilaksanakan. Kata kunci: Sebab-Sebab Kemiskinan, Field Study, Deskriptif Kuantitatif.

ABSTRACT

Poverty is one of the problems faced by almost all countries in the world, especially for developing countries like as Indonesia. As one of the provinces in Indonesia, East Java is inseparable from the problem of poverty. According to the statistical body of the province of East Java in 2017 it was recorded that 11.77% of the population of East Java were in poverty and Lamongan Regency is ranked 10th in the ranking of districts or city that have the highest poverty rate in East Java. The number of poor people in Lamongan District in March 2017 reached 171.38 thousand people. But, according to information obtained at the time of research in the field of the local social service mentioned that the number of poor people in 2019 has decreased to 148,917 thousand inhabitants. This research explore the caused of poverty, the extent of the effectiveness and constraints faced by the Lamongan Government in the efforts that have been made to alleviate poverty by using field studies (qualitative studies) with qualitative method and descriptive quantitative based on data obtained from Central Bureau of Statistics. In the field study, researchers will individually communicate and observe directly the people they are researching as recipients of poverty alleviation programs in the target areas of the sample Sarirejo, Babat and Brondong Subdistricts. The results showed that there were several causes of poverty in Lamongan District, such as social assistance that was not yet on target, inequality in health facilities, inadequate educational infrastructure, and community empowerment in micro-businesses was not optimal. However, at present all regional apparatuses have made continuous improvement efforts, such as adding health facilities in each village in the form of Village Health Posts (Poskesdes) and healthy cars, as well as conducting verification and re-validation of the number of poor people. For this reason, it can be said that efforts to reduced poverty have not been effectively implemented. Keywords: Causes of Poverty, Field Study, Quantitative Descriptive.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan besar yang dihadapi hampir diseluruh Negara di dunia, terutama bagi Negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional (Pattinama, 2009). Ishartono dan Raharjo, (2016) menyatakan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) adalah no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. SDGs diharapkan tercapai di tahun 2030.

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa atau sebesar 9,82 persen dari jumlah total penduduk Indonesia (<https://www.bps.go.id>). Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah tingginya pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk tinggi, yakni meningkat sekitar 1,36% dari tahun 2010-2016 (<https://www.bps.go.id>). Peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia akan turut mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Apabila jumlah penduduk terus bertambah dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tetap, maka hal tersebut akan berdampak pada tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga potensi kemiskinan dikhawatirkan dapat semakin meningkat (Ningrum, 2017).

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Jawa Timur tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut badan pusat statistik provinsi Jawa Timur jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 39.292.972 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,64% setiap tahunnya. Pada tahun yang sama tercatat sebesar 11,77% dari penduduk Jawa Timur berada dalam jurang kemiskinan. Berikut adalah sepuluh besar kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar di Jawa Timur.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Persentase (%)
1	Kab. Sampang	23,56
2	Kab. Bangkalan	21,32
3	Kab. Probolinggo	20,52
4	Kab. Sumenep	19,62
5	Kab. Tuban	16,87
6	Kab. Pamekasan	16,00
7	Kab. Pacitan	15,42
8	Kab. Ngawi	14,91
9	Kab. Bondowoso	14,54
10	Kab. Lamongan	14,42

(Sumber: <https://jatim.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2017 kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke sepuluh dalam peringkat kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2017 mencapai 171.38 ribu jiwa. Akan tetapi, menurut informasi yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan dinas sosial setempat menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2019 telah mengalami penurunan menjadi 148.917 ribu jiwa yang nantinya akan di verifikasi dan validasi ulang yang mana bisa jadi hasil verifikasi dan validasi ulang dapat menunjukkan jumlah penduduk miskin yang kembali mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Lamongan sebesar 0,47 persen lebih baik dibandingkan Jawa Timur yang turun sebesar 0,28 persen dalam periode yang sama.

Hasil penelitian Suhartini, dkk (2018) membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, UMK dan pertumbuhan ekonomi. Namun, belum optimal dalam menangani pertumbuhan penduduk, pengangguran dan tingkat kemiskinan. Hal ini terbukti Kabupaten Lamongan sampai dengan saat ini tergolong sepuluh besar Kabupaten termiskin di Jawa Timur. Untuk itu, penelitian ini akan menggali sejauhmana tingkat efektifitas dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dengan menggunakan *field study* (studi lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam studi lapangan, peneliti secara individu akan berkomunikasi dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya sebagai penerima program-program pengentasan kemiskinan pada wilayah yang menjadi target sampel, yaitu Kecamatan Sarirejo, Babat dan Brondong. Dipilihnya wilayah ini sudah dianggap cukup mewakili wilayah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: (1) Apa saja yang menjadi sebab-sebab kemiskinan di Kabupaten Lamongan?; (2) Sejauhmana efektifitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan?; (3) Sejauhmana kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan?.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis sebab-sebab kemiskinan di Kabupaten Lamongan, (2) Mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, (3) Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, seperti berikut: (1) Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, (2) Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk meninjau ulang perencanaan program-program strategi pengentasan kemiskinan, (3) Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk melihat lebih dekat pada akar-akar masalah pengentasan kemiskinan. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian field study (studi lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Studi lapangan merupakan penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti melakukan pengamatan dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Dalam studi lapangan, peneliti akan melakukan komunikasi dan mengamati secara langsung kepada orang-orang yang sedang ditelitinya, sedangkan penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai dengan standardisasi tertentu. Menurut data dari BPS Jawa Timur Kabupaten Lamongan memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomiannya, namun pada saat ini Kabupaten Lamongan ke dalam 10 besar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati fenomena kemiskinan yang ada di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil riset tipologi yang dilakukan oleh (Ratnasari dan Santoso, 2014) kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Lamongan adalah kecamatan Babat dan kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan terendah di Kabupaten Lamongan adalah kecamatan Brondong. Selain itu, menurut data BPS tahun 2017 diketahui bahwa kecamatan Sarirejo merupakan salah satu kecamatan yang penyediaan fasilitas sarana kesehatannya

masih sangat terbatas, sehingga untuk pendekatan penelitian menggunakan studi lapangan mengambil lokasi di Kabupaten Lamongan Kecamatan Babat, Kecamatan Brondong dan Kecamatan Sarirejo karena dianggap cukup mewakili wilayah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka fokus peneliti pada penelitian ini adalah upaya untuk menggali perspektif masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Lamongan terkait sebab-sebab kemiskinan yang mereka hadapi sulit untuk diturunkan. Peneliti juga ingin berfokus untuk mengukur sejauhmana efektifitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dikarenakan dalam penelitian langsung di lapangan, mengamati fenomena, penelitian historis komparatif, dan beberapa penelitian lain jenis data yang digunakan adalah data kualitatif untuk menggambarkan rincian tentang manusia, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial (Neuman, 2013:559). Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang akan digunakan berupa teks dari dokumen, catatan observasi, dan naskah wawancara terbuka. Selain itu, juga digunakan data sekunder dari data BPS Kabupaten Lamongan dan hasil empiris penelitian sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara semi-terstruktur dengan masyarakat yang berdomisili pada wilayah sampel penelitian di Kabupaten Lamongan, sedangkan sumber data sekunder, dalam penelitian ini adalah data terkait tingkat kemiskinan yang diperoleh dari BPS, artikel ilmiah, artikel yang dipublikasi secara online yang berkaitan dengan hasil wawancara semi-terstruktur, sehingga data tersebut dapat menjadi penunjang sumber data primer.

Penelitian ini memutuskan untuk menggunakan key informan atau informan kunci kepala desa di masing-masing desa yang menjadi target sampel, selanjutnya berdasarkan informasi dari kepala desa akan dipilih tiga Kepala Rumah Tangga (KRT) yang menerima program bantuan pengentasan kemiskinan di masing-masing desa. Creswell (2007) menyatakan bahwa tiga sampai sepuluh informan sudah cukup, sehingga total informan sebanyak sembilan KRT. Berikut rekapitulasi calon informan, sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Informan (KRT)	Keterangan
1	Brondong	Brondong	Jampang RT 3/RW 5	Kuanita	Termiskin
		Brondong	Brondong RT 3/RW 5	Sumiah	Menengah

2	Babat	Brondong	Jl Pemuda RT1.RW4	Sumito	Kurang Miskin
		Babat	Jl Raneh RT 2.RW4	Edi Suwityo	Terakhir
		Babat	Jl Sumowi rhajo gg Candra RT2.RW9	Nuruk Sumarni	Menengah
3	Sarirejo	Babat	Jl Pondok RT3.RW4	Suwamo	Kurang Miskin
		Dermole mahbang	RT1.RW8	Sulkan	Terakhir
		Dermole mahbang	RT4.RW8	Nasrun	Menengah
		Dermole mahbang	RT1.RW7	Ahmad Dasrip	Kurang Miskin

Sumber: Dinas Sosial (2019)

Pengumpulan data dilakukan untuk dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang diperlukan agar dapat menjelaskan masalah-masalah dan memecahkan masalah yang diteliti (Arikunto, 2006:149). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Azwar (2013:91) jenis penelitian yang menggunakan pendekatan field research, maka metode pengumpulan datanya menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur secara mendalam (indepth interview)

Metode wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2014:232).

2. Observasi (pengamatan)

Menurut Sugiyono (2014:145) observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Melalui observasi peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau orang dalam responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan parasubjek penelitian terhadap kehadiran peneliti, sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan terkait dengan fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai informasi yang berasal dari catatan penting, rekaman audio, rekaman visual, foto dan dokumen baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan yang diperoleh secara langsung dan diabadikan selama berlangsungnya penelitian (Hamidi, 2004:72)

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian tersebut dilaksanakan (Cresswell, 2014:274). Ada dua teknik analisis yang dilakukan:

Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sambil lalu melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan memikirkan susunan laporan akhir. Penelitian ini merupakan field research yang biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan. Penelitian lapangan mengamati fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Fenomena yang diamati pada penelitian ini adalah sebab-sebab kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan sulit untuk diturunkan. Melalui penelitian ini peneliti ingin mengukur sejauhmana efektifitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan sejauhmana kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Lamongan. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dapat dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data adalah merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Conclusion Data dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin jugatidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti beradadi lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupadeskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2012:7) teknik analisis data deskriptif kuantitatif dilakukan melalui analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum atau generalisasi. Berbagai data kuantitatif yang telah terkumpul dan diperoleh melalui berbagai sumber berkaitan dengan penyebab kemiskinan di Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan secara objektif dan sistematis situasi yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebab-Sebab Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan

Terdapat berbagai penyebab terjadinya kemiskinan di Jawa Timur, melalui penelitian dan pengembangan (Balitbang) Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yang telah peneliti lakukan –Suhartini, dkk– sebelumnya dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Lamongan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan formal masyarakat Kabupaten Lamongan adalah angka partisipasi sekolah umur 16-18 tahun.
2. UMK
Upah minimum kota adalah tingkat upah yang memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah Minimum Kota/Kabupaten adalah upah minimum kota yang berlaku di Kabupaten Lamongan
3. Pertumbuhan Penduduk
Adalah perubahan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh perubahan adanya kelahiran, kematian dan migrasi.
4. Pengangguran
Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lamongan adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau yang mempersiapkan usaha serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
5. Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dan merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat di suatu wilayah. Karena pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan ekonomi, sehingga apabila angka partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tinggi, maka tingkat kemiskinan bisa menurun. Selain itu, tingkat pendidikan juga dapat menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kemiskinan sebuah daerah. Karena tingkat pendidikan yang rendah adalah sebuah pertanda rendahnya kualitas kehidupan masyarakat di suatu daerah.

Selain tingkat pendidikan, angka harapan hidup dalam suatu wilayah juga menjadi penentu yang dapat di gunakan sebagai alat pendeteksi kemiskinan. Apabila penduduk miskin nya banyak, maka angka harapan hidup di daerah tersebut pasti akan rendah. Penyebabnya adalah karena penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan, sehingga jika jatuh sakit mereka tidak bisa mengobati dirinya karena ketidakmampuan.

Dampak dari kemiskinan yang dapat terjadi di Lamongan sangat beragam. Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Rendahnya kualitas hidup tersebut di sebabkan oleh rendahnya pendapatan yang di peroleh atau berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan yang menurun. Pendapatan yang rendah dapat di sebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau sempit dapat mengakibatkan negara yang miskin akan menyulitkan masyarakatnya untuk memiliki modal dan peluang usaha. Sehingga bergantung hanya pada perusahaan orang lain tanpa memikirkan bagaimana mencari peluang untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri bagi diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, kemiskinan juga mendorong timbulnya kriminalitas. Kriminalitas terjadi karena sulitnya memenuhi kebutuhan dengan segala keterbatasan penghasilan dan kesenjangan yang tinggi, sehingga memancing orang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan serta tindak kejahatan lain. Dampak lain yang di sebabkan oleh kemiskinan adalah rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan rendah karena kesadaran masyarakat akan pendidikan kurang, di sebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan. Dan kualitas kesehatan menurun karena apabila pendidikan rendah, pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan juga rendah. Akibatnya tingginya tingkat penduduk yang memiliki riwayat penyakit. Dan mereka tidak mampu untuk mengobati penyakitnya, sehingga angka harapan hidup menjadi rendah, karena sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Harus diakui bahwa program pemberantasan kemiskinan yang selama ini dilakukan pemerintah cenderung berorientasi amal-karitatif, alih-alih pemberdayaan. Mulai dari pemberian beras sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) hingga Kartu Keluarga Sejahtera dan lain sebagainya.

Karena hanya bersifat bantuan materil, tidak ada stimulasi munculnya swakarsa dari masyarakat. Istilahnya, alih-alih diberi ikan, sebaiknya warga diberi pancing kemudian diajari mencari ikan sendiri. Program-program semacam ini pada akhirnya hanya menurunkan akan dapat menurunkan kemiskinan secara temporer dan malah membuat masyarakat jadi ketergantungan. Segala bentuk bantuan yang ada mengakibatkan masyarakat sekitar yang menerima bantuan cenderung bergantung terhadap bantuan tersebut dan membuat masyarakat menjadi malas dan ketergantungan pada bantuan.

Selain itu, BPS mengklasifikasikan kemiskinan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan sosial. Melalui hasil penelitian dan wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa jenis kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Babat, Kecamatan Brondong dan Kecamatan Sarirejo adalah jenis kemiskinan sosial bukan kemiskinan absolut apabila ditinjau dari kondisi rumah tinggal informan, serta kemampuan mereka dalam memenuhi sandang pangan dan papan.

Selain itu, ditemukan data bahwa kualitas pendidikan di wilayah Kecamatan Babat masih belum merata, terutama disebabkan penempatan tenaga pendidik atau guru yang tidak merata, kurangnya tenaga administrasi di pendidik sekolah dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Isu strategis lainnya dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah masih kurangnya beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu dan kurangnya mutu pendidikan yang dipengaruhi oleh kualitas SDM dari tenaga pendidik (guru), sehingga prioritas pemerintah Kecamatan Babat untuk mengurangi masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Sejauhmana Efektifitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Yang Sudah Dilaksanakan Di Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan cukup efektif di Kabupaten Lamongan khususnya pada kecamatan Babat, Kecamatan Brondong dan Kecamatan Sarirejo. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga telah diterima oleh masyarakat setempat, bantuan yang diterima diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bantuan yang diterima oleh setiap kepala keluarga selama ini berupa bantuan non tunai seperti penerimaan sembako berupa beras 10 Kg dan telur atau penerimaan manfaat berupa uang tunai. Namun, bantuan tersebut masih dirasa belum cukup efektif sebab tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs menjelaskan bahwa strategi mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan perlindungan sosial yang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Apabila dianalisis melalui tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka pemberian bantuan yang diserahkan secara langsung masih dirasa belum cukup efektif. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan UMKM juga telah dilakukan. Berikut adalah dokumentasi penelitian dengan salah satu warga yang memiliki usaha keripik buah naga melalui program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lamongan.

Upaya pemberdayaan warga tentu telah dilakukan oleh pemerintah setempat di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi, setelah mencoba secara langsung keripik buah naga yang dijual oleh Ibu Siti masih perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut agar upaya pemberdayaan tersebut dapat lebih efektif dan lebih maksimal karena cita rasa keripik buah naga belum terlalu menonjolkan ciri khas rasa dari buah naga dan pengemasan produk juga masih dirasa belum cukup menarik. Selain itu, distribusi, pemasaran dan penjualan produk juga masih harus lebih dimaksimalkan.

Hal serupa juga terjadi pada Kecamatan Brondong. Sub sektor perikanan menjadi unggulan di Kecamatan Brondong. Terdapat 5 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pelabuhan Perikanan (PP) dan 1 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), yang menampung aktifitas penjualan ikan hasil tangkapan nelayan Kecamatan Brondong. Akan tetapi, warga disekitar Kecamatan

Brondong masih belum mengoptimalkan potensi sektor sektor perikanan yang mereka miliki, seharusnya masyarakat daerah setempat dapat lebih diberdayakan dengan memberikan pendampingan dan edukasi pada pengolahan ikan untuk dijadikan makanan camilan seperti kerupuk, mengingat jumlah penduduk banyak didominasi oleh perempuan. Hal ini merupakan peluang yang besar dalam memberdayakan masyarakat dalam industri rumahan, sebab melalui penelitian studi lapangan yang dilakukan dapat diketahui bahwa kerupuk ikan yang dijual di Kecamatan Berondong merupakan kerupuk ikan dan camilan yang berasal dari daerah Gersik dan Sidoarjo bukan merupakan hasil olahan daerah setempat.

Sejauhmana Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan

Kendala yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan terletak pada pendistribusian bantuan yang masih belum tepat sasaran dikarenakan para penerima bantuan masih belum terdata dengan baik. Masih terdapat data penerima bantuan yang ganda, bahkan ada informan yang alamatnya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Bahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Bapak Kamil menyatakan. "Tahun 2019 akan diadakan verifikasi dan validasi ulang –verval– tentang jumlah penduduk miskin yang tujuannya untuk meningkatkan validitas dari data para penerima bantuan yang kedepannya akan diberikan penandaan berupa stiker pada rumah penduduk yang menerima bantuan." Tujuan dari pemberian stiker sendiri adalah agar bantuan dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga dapat memberikan efek jera dan shock therapy bagi masyarakat yang menyalahgunakan bantuan dana social tersebut, sebab hasil Studi lapangan banyak menemukan fakta bahwa bantuan yang telah diberikan selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kriteria keluarga miskin.

Berkaitan dengan pendistribusian bantuan yang tidak tepat sasaran hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Pablo Acosta Ekonom Senior Bank Dunia dalam kajian Bank Dunia lebih dari separuh manfaat justru tersalur ke rumah tangga yang tak miskin dan rentan, Dalam risetnya, Pablo menyoroti besarnya nilai penyaluran bansos yang tidak memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat. Sejumlah bansos juga dinilai tidak tepat waktu karena diberikan terlalu dini atau justru terlambat. Oleh karena itu Bank Dunia menyarankan Pemerintah Indonesia membenahi penyaluran bansos. Pemerintah juga disarankan memilih penerima manfaat berdasarkan database bersama, termasuk menyiapkan pemutakhiran data dua arah antara database dan data penerima bantuan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan tiga strategi utama untuk pengentasan kemiskinan melalui agenda SDGs. Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat tiga pilar, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung. Pilar pertama akan diwujudkan melalui indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan), kedua, ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan). Sementara itu, pilar kedua dan ketiga akan direalisasikan melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan yang berkelanjutan.

Masalah keterbatasan fasilitas kesehatan merupakan salah satu kendala terbesar yang dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu strategi untuk pengentasan kemiskinan. Kecamatan Sarirejo berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Laporan Kecamatan Sarirejo dalam Angka 2017 yang menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas sarana kesehatan di Kecamatan Sarirejo masih sangat terbatas.

Demi mencapai terwujudnya agenda Sustainable Development Goals (SDGs), maka Kecamatan Sarirejo terus melakukan upaya perbaikan terutama di bidang penyediaan fasilitas sarana kesehatan. Perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Sarirejo diwujudkan dengan bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan yang ditambahkan pada Kecamatan Sarirejo berupa adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan adanya Mobil Sehat yang siap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Sarirejo setiap waktu.

KESIMPULAN

Angka kemiskinan dapat dikurangi ketika masyarakat diantaranya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai dan mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan yang terjadi pada Kabupaten Lamongan dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya: Pertama, masih banyak lembaga pendidikan yang belum terakreditasi. Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Babat menunjukkan kualitas pendidikan masih belum merata, hal tersebut diakibatkan penempatan tenaga pendidik belum merata, kurangnya tenaga administrasi, kurangnya sarana prasarana pendidikan dan pemberian bea siswa. Kedua, belum mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pada industri kreatif mikro, seperti pengolahan kerupuk ikan di Kecamatan Brondong, pengolahan keripik buah naga di Kecamatan

Sarirejo. Ketiga, Fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tim medis belum merata.

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga telah diterima oleh masyarakat setempat, bantuan yang diterima diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Upaya pemberdayaan warga tentu telah dilakukan oleh pemerintah setempat di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi hal ini masih belum dapat terlaksana secara optimal. Potensi unggulan sektor industri rumahan di Kecamatan Brondong belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat potensi hasil ikan yang melimpah. Seharusnya, lebih memperhatikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya perempuan di wilayah pesisir untuk memanfaatkan hasil ikan dijadikan makanan camilan, seperti kerupuk melalui pemberdayaan usaha mikro. Usaha ini untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan terletak pada pendistribusian bantuan yang masih belum tepat sasaran dikarenakan para penerima bantuan masih belum terdata dengan baik. Masih terdapat data penerima bantuan yang ganda, bahkan ada informan yang alamatnya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Guna mengantisipasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengadakan verifikasi dan validasi ulang di Tahun 2019 ini berkaitan dengan jumlah penduduk miskin yang tujuannya untuk meningkatkan validitas dari data para penerima bantuan. Selain itu, kedepannya akan diberikan penandaan berupa stiker pada rumah penduduk yang menerima bantuan untuk lebih memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan merupakan bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam industri kreatif sudah dilakukan namun belum efektif, dikarenakan ada masalah dalam rasa, pengemasan dan distribusi.

Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Penyebab dari terjadinya kemiskinan dapat dikarenakan adanya bantuan yang masih belum tepat sasaran, sarana kesehatan masih belum merata dan sarana pendidikan belum memadai. Program bantuan sosial dan perbaikan terus diupayakan. Hal tersebut bahkan diwujudkan, melalui adanya penambahan fasilitas kesehatan berupa Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Mobil Sehat. Tentunya penambahan fasilitas tersebut dapat dikatakan efektif apabila dapat tersampaikan dan digunakan oleh seluruh warga yang membutuhkan. Selain itu, wacana verifikasi dan validasi ulang atas data penduduk yang menerima bantuan perlu segera dilaksanakan agar kedepannya bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah dapat menjadi bantuan yang tepat sasaran. Penyaluran bantuan yang dilakukan dengan pengawasan serta pelatihan memadai dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga bantuan yang diterima mampu memberikan manfaat bagi penerimanya secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

1. Dinas Pendidikan: Lebih meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kualitas sarana prasarana, dengan memberikan diklat dan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus. Disamping itu, melakukan monitoring dan evaluasi pada sekolah yang dikelola swasta, khususnya pada kurikulum dan penyediaan sarana prasarana. Untuk itu, perlu ditingkatkan lembaga pendidikan yang terakreditasi.
2. Dinas Kesehatan: Lebih meningkatkan penyediaan sarana prasana kesehatan dengan melakukan pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan dan tim medis di setiap desa dan kecamatan.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Untuk lebih meningkatkan usaha kreatif masyarakat pedesaan dengan cara membina industri rumahan dengan mengedukasi masyarakat dan memberikan pelatihan dalam pengolahan makanan sehat dengan melihat potensi unggulan masing-masing wilayah di Kabupaten Lamongan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
4. BPS Kabupaten Lamongan: Untuk menyediakan data PDRB per Kecamatan, hal ini dimaksudkan untuk lebih mudah memetakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kecamatan, sehingga akan lebih mudah dalam menangani tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah.
5. Dinas Sosial: Untuk menyediakan data penduduk miskin yang lebih valid, sehingga pemberian bantuan sesuai dengan sasaran.
6. Dinas KUMKM: Dapat memberikan bantuan permodalan untuk industri rumahan dengan memberikan edukasi mendirikan koperasi wanita.
7. Agar kemiskinan di Kabupaten lamongan dapat diatasi secara efektif, maka perlu adanya koordinasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk masing-masing SKPD agar permasalahan kemiskinan tidak dilakukan secara parsial oleh masing-masing Dinas namun dapat dilakukan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. R., Kanto, S., & Susilo, E. (2015). Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin. *Wacana*, 18(4), 221–230.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2018). *Lamongan Dalam Angka*. Lamongan: Bappeda
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Kecamatan Babat (2018). *Kecamatan Babat Dalam Angka*. Lamongan: Bappeda
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Kecamatan Babat (2018). *Kecamatan Babat Rencana Strategis (Rens- tra 2016-2021)*. Lamongan: Bappeda
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong (2018). *Kecamatan Brondong Dalam Angka*. Lamongan: Bappeda
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Kecamatan Sarirejo (2017). *Kecamatan Sarirejo Dalam Angka*. Lamongan: Bappeda
- Creswell John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sumadi Suryabrata. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Ishartono & Raharjo, S. T. (2015). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Social Work Jurnal*, 0042, 159–167.
- Juhardi, R. R., & Hamidi, W. (2015). Studi empiris capaian mdgs di provinsi riau, (3), 272–289.
- Neuman, W.Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia. Jakarta: PT.Indeks.
- Pattinama, M. J. (2009). Poverty Reduction through Local Wisdom. *Makara, Sosial Humaniora*, 13(1), 1–12.
- Putu, N., Purnama, A., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Piramida*, XII(1), 101–110.
- Statistik, B. P. (2018). Berita Resmi statistik keadaan ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik. [https://doi.org/No. 74/11/35/Th.XVI](https://doi.org/No.74/11/35/Th.XVI), 5 November 2018
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.